

PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NORISTA GATHAMA PUTRA

NIM. C2B006047

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Norista Gathama Putra

Nomor Induk Mahasiswa : C2B 006 047

Fakultas / Jurusan : Ekonomi \ Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA MODAL DAN
BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

Dosen Pembimbing : Drs. Y. Bagio Mudakir MSP.

Semarang, 8 Maret 2011

Dosen Pembimbing

(Drs. Y. Bagio Mudakir MSP.)

NIP. 195406091981031004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Norista Gathama Putra

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006047

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA MODAL DAN
BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU
PERTUMBUHAN EKONOMI DI
PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Maret 2011

Tim Penguji

1. Drs. Y Bagio Mudakir, MSp. (.....)

2. Prof. Dr. Hj. Indah Susilowati, MSc. (.....)

3. Hastarini Dwi Atmanti, SE. Msi. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Norista Gathama Putra

NIM : C2B006047

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH** adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Saya mengakui bahwa karya skripsi ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari dosen pembimbing saya yaitu **DRS Y BAGIO MUDAKIR ,MSP.**

Apabila dikemudian hari ditemukan hal – hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 8 Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

(Norista Gathama Putra)

NIM. C2B 006 047

ABSTRACT

Government expenditure or regional spending is a form of investment made by local government. It aims to stimulate the regional economy. The government expenditure is divided into 2 (two) forms, there are capital spending and operational spending. According to the researchs of Jamzani Sodik (2007), Siti Aisyah Tri Rahayu (2004), Mesghena Yasin (2002), and Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, and Heng-fu Zou (1996) showed the different correlation between capital spending and operational spending to the economic growth. This study is aimed to verify the behavior of capital spending and operational spending toward economic growth in 35 Regencies / Cities in Central Java Province during 2005 – 2008 period.

The operational variables were economic growth (GR) as the dependent variable, and the ratio of capital spending to the PDRB (GIR) with the ratio of operational spending to the PDRB (GCR) as the independent variable, this research also employed Least Square Dummy Variable (LSDV) to enrich the recommendation of this study.

The results showed that ratio of capital spending has probability value of 0,0108 which less than α 5%, also the coefficient of 7,2382, it means this variable has positively and significant correlation to the economic growth in 35 Regencies / Cities in Central Java Province. Likewise to the ratio of operational spending which it has probability value of 0,0128 less than α 5%, also the coefficient of 3,7010, it means this variable has positively and significant correlation to the economic growth in 35 Regencies / Cities in Central Java Province. In the same level of credibility in 95%, shown the effect of capital spending is more than the effect of operational spending, so as the policy implication that local government supposed to do is give more concern to the capital spending as the booster of economic growth.

Keywords : *Economic, Growth, Spending, Central Java, Least-Square-Dummy-Variabel.*

ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hal ini bertujuan untuk merangsang perekonomian suatu daerah. Pengeluaran pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu belanja modal dan belanja operasi. Berdasarkan penelitian – penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007), Siti Aisyah Tri Rahayu (2004), Mesghena Yasin (2002), dan Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou (1996) menunjukkan hubungan yang berbeda – beda antara belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2005 – 2008.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan ekonomi (GR) sebagai variabel dependen, dan rasio belanja modal terhadap PDRB (GIR) serta rasio belanja operasi terhadap PDRB (GCR) sebagai variabel independen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel rasio belanja modal memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0108 lebih kecil dari nilai α 5% serta koefisien sebesar 7,2382, hal ini berarti variabel rasio belanja modal memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.. Begitu juga dengan variabel rasio belanja operasi yang memiliki probabilitas sebesar 0,0128 lebih kecil dari nilai α 5% serta koefisien sebesar 3,7010, hal ini berarti variabel rasio belanja operasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada taraf kepercayaan yang sama yaitu sebesar 95%, terlihat efek dari belanja modal lebih besar daripada belanja operasi, jadi sebagai implikasi kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah lebih memfokuskan pada penggunaan instrumen belanja modal untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : **Ekonomi, Pertumbuhan, Belanja, Jawa Tengah,**
 Least-Square-Dummy-Variabel.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, petunjuk, dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH sebagai salah syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S-1 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, kritik, dorongan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Melalui lembar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP, selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, mengarahkan, dan memberikan masukan – masukan yang berarti demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah membukakan cakrawala ilmiah kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua dan adik penulis atas segala doa, dukungan moral, kepercayaan, serta segala bentuk dukungan lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

8. Mas Sasongko yang telah memudahkan penulis dalam pengumpulan data di Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
9. Ibu Wahyu yang telah memudahkan penulis dalam pengumpulan data di DPRD Provinsi Jawa Tengah.
10. Katrin Costansinathang Panesse atas segala bentuk dukungan yang tulus kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Teman – teman IESP 2006 (Bungaran, Suryo, Doddy, Dorani, Rendy, Bertha, Tika, Osti, dll) yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah banyak membantu dengan memberikan masukan – masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.
12. Serta semua sahabat, teman, serta pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan / keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

Semarang, 10 Maret 2011

(Norista Gathama Putra)

NIM. C2B 006 047

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	22
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	40
2.4 Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	43
3.1.1 Variabel Penelitian	43
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	45
3.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.4 Metode Analisis	47
3.4.1 Spesifikasi Model	48
3.4.2 Pengujian Model	51
3.5 Uji Asumsi Klasik	52
3.5.1 Uji Multikolinearitas	52
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	53
3.5.3 Uji Autokorelasi	53
3.6 Pengujian Statistik Analisis Regresi	55
3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)	55
3.6.2 Pengujian <i>Best of Fit</i> Model	56
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	60
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	60
4.1.1 Keadaan Wilayah	60
4.1.2 Pengeluaran Pemerintah pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa tengah	62
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah	66
4.2 Analisis Data	70
4.2.1 Pengujian Model	71

4.2.2 Uji Asumsi Klasik	72
4.2.3 Uji Statistik Analisis Regresi	74
4.2.4 Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	75
4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan	77
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
5.3 Keterbatasan	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN – LAMPIRAN	86
CURRICULUM VITAE PENULIS	111

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2005 – 2008	3
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008	6
Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008	8
Tabel 1.4 Realisasi Belanja Operasi Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin-Watson	54
Tabel 4.1 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008	64
Tabel 4.2 Kondisi Perekonomian 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kriteria Tipologi Klasen tahun 2005 – 2008	70
Tabel 4.3 Hasil Analisis Data	71
Tabel 4.4 <i>Dummy Effect</i> Hasil Regresi	75
Tabel 4.5 Persamaan Regresi Tiap Kabupaten / Kota	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pengeluaran Pemerintah	25
Gambar 2.2 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner ..	28
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	41
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Durbin-Watson	55
Gambar 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 Non Migas	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor ekonomi tersebut pada suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor – faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada saatnya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Begitu juga di daerah, sasaran utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki dimana pada umumnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No 32 dan 33 tahun 2004 yaitu mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan, banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam pembangunan daerahnya. Kesulitan – kesulitan tersebut merupakan tantangan besar yang harus dihadapi serta ditangani oleh pemerintah daerah dengan kembali memikirkan mengenai strategi – strategi pembangunan yang harus dilakukan. Strategi pembangunan tersebut menyangkut peranan pemerintah dalam perekonomian di luar pasar. Karena kekuatan pasar sendiri tidak akan berjalan sempurna apabila tidak mengikutsertakan campur tangan pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).

Tantangan yang dihadapi suatu daerah terutama untuk daerah otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumber daya di daerah yang terbatas. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangatlah diperlukan. Arah penentu kebijakan dan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria – kriteria prioritas pembangunan salah satunya berupa peningkatan investasi disuatu daerah, dengan meningkatnya investasi maka dampaknya akan mendorong pertumbuhan pada segala sektor dan akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pembangunan di Propinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian

masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selama periode 2005 – 2008 pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah mengalami rata – rata pertumbuhan hanya sebesar 5,43 persen, sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar rata-rata 5,46 persen. Provinsi Jawa Tengah juga merupakan provinsi dengan rata – rata pertumbuhan ekonomi paling rendah di banding dengan provinsi di pulau jawa lainnya selama periode 2005 – 2008.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2005 – 2008
(persen)

Provinsi	2005	2006	2007	2008	Rata - rata
Banten	6,01	5,95	6,04	5,89	5,97
DKI Jakarta	5,60	6,02	6,44	6,19	6,06
Jawa Barat	5,35	5,33	6,41	5,90	5,75
Jawa tengah	5,35	5,33	5,59	5,46	5,43
DI Yogyakarta	5,84	5,80	4,57	5,68	5,47
Jawa Timur	5,84	5,80	6,11	5,90	5,91
Indonesia	5,38	5,18	5,67	5,59	5,46

Sumber : BPS, 2009

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah pengeluaran pemerintah (G). Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah

merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah.

Perekonomian Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kabupaten / Kota yang berada pada wilayah Provinsi tersebut. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten / Kota yang tersebar di wilayah administratifnya, dimana Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 (enam) Kota. Berdasarkan data BPS, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas pada 4 tahun terakhir, terdapat 6 Kabupaten / Kota yang mempunyai besaran dan peranan cukup dominan dalam pembentukan PDRB Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan. Sementara itu, untuk Kabupaten / Kota yang lain memiliki sumbangan terhadap total PDRB Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah relatif rendah, yaitu kurang dari 4 persen (BPS, 2009). PDRB inilah yang akan membentuk laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Tabel 1.2 pertumbuhan ekonomi di tiap – tiap daerah berfluktuatif, hanya terdapat 5 (lima) daerah saja yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Pekalongan. Namun pertumbuhan ekonomi kedua wilayah tersebut berada dibawah rata – rata seluruh pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 4,48 persen dengan standar deviasi sebesar 0,84. Selain kedua wilayah tersebut terdapat 18

wilayah lainnya yang berada di bawah rata – rata pertumbuhan 4,48 persen. Wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada periode tahun 2005 – 2008 adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar, meskipun ketiga wilayah tersebut bukan merupakan wilayah dengan PDRB yang tergolong tinggi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, adalah pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Sodik, 2007). Pengeluaran pemerintah pada sektor publik ini dapat dilihat dari jumlah belanja modal yang terdapat di realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di masing – masing daerah. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya (BPS, 2009). Keseluruhan belanja modal tersebut merupakan infrastruktur yang digunakan oleh daerah. Ketersediaan infrastruktur tersebut penting bagi suatu daerah untuk menarik investor masuk, karena seringkali hambatan investasi terjadi bukan karena terbatasnya pasar atau kekurangan bahan mentah ataupun tenaga kerja melainkan karena terbatasnya jenis prasarana atau infrastruktur yang ada di daerah tersebut (Sukirno, 1985).

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Regional
Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008
(persen)

No.	Kabupaten / Kota	Tahun				Rata - rata
		2005	2006	2007	2008	
1	Cilacap	5,33	4,72	4,87	4,92	4,96
2	Banyumas	3,21	4,48	5,30	5,41	4,60
3	Purbalingga	4,18	5,06	6,19	5,30	5,18
4	Banjarnegara	3,95	4,35	5,01	4,98	4,57
5	Kebumen	3,20	4,08	4,52	5,61	4,35
6	Purworejo	4,85	5,23	6,08	5,62	5,45
7	Wonosobo	3,19	3,23	3,58	3,69	3,42
8	Kab. Magelang	4,62	4,91	5,21	4,99	4,93
9	Boyolali	4,08	4,19	4,08	4,04	4,10
10	Klaten	4,59	2,30	3,31	3,93	3,53
11	Sukoharjo	4,11	4,53	5,11	4,84	4,65
12	Wonogiri	4,31	4,07	5,07	4,27	4,43
13	Karanganyar	5,49	5,08	5,74	5,75	5,52
14	Sragen	5,16	5,18	5,73	5,69	5,44
15	Grobogan	4,74	4,00	4,37	5,33	4,61
16	Blora	4,07	3,85	3,95	5,62	4,37
17	Rembang	3,56	5,53	3,81	4,67	4,39
18	Pati	3,94	4,45	5,19	4,94	4,63
19	Kudus	4,40	2,48	3,03	3,71	3,41
20	Jepara	4,23	4,19	4,74	4,49	4,41
21	Demak	3,86	4,02	4,15	4,11	4,04
22	Kab. Semarang	3,11	3,81	4,72	4,26	3,98
23	Temanggung	3,99	3,31	4,03	3,54	3,72
24	Kendal	2,63	3,67	4,31	3,92	3,63
25	Batang	2,80	2,51	3,49	3,67	3,12
26	Pekalongan	3,98	4,21	4,59	4,78	4,39
27	Pemalang	4,05	3,72	4,47	4,99	4,31
28	Kab. Tegal	4,72	5,19	5,59	5,32	5,21
29	Brebes	4,80	4,71	4,79	4,81	4,78
30	Kota Magelang	4,33	2,44	5,17	5,05	4,25
31	Kota Surakarta	5,15	5,43	5,82	5,69	5,52
32	Kota Salatiga	4,15	4,17	5,39	4,98	4,67
33	Kota Semarang	5,14	5,71	5,98	5,59	5,61
34	Kota Pekalongan	3,82	3,06	3,80	3,73	3,60
35	Kota Tegal	4,87	5,15	5,21	5,15	5,10

Sumber : PDRB Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, BPS Jawa Tengah, 2009

Selain pengeluaran pemerintah daerah pada sektor publik yang bersifat investasi juga terdapat pengeluaran pemerintah untuk keperluan konsumsi yang dicerminkan oleh belanja operasi, walaupun belanja operasi dampaknya tidak

langsung terhadap pembangunan, melainkan melalui multipliernya yang akan berdampak pada pembangunan. Baik belanja operasi maupun belanja modal, keduanya sama – sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena jika perekonomian hanya ditopang oleh konsumsi saja atau investasi saja, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan maksimal. Oleh karena itu diperlukannya sinergi dari kedua jenis pengeluaran pemerintah tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat maksimal (Purba, 2006).

Kondisi perekonomian secara keseluruhan di tiap – tiap daerah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan. Seperti yang sudah di bahas, belanja daerah sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu belanja operasi dan belanja modal. Yang membedakan kedua jenis belanja daerah tersebut adalah sifatnya, belanja operasi lebih bersifat konsumsi dari pemerintah daerah bersangkutan pada kurun waktu tertentu, sedangkan belanja operasi lebih bersifat investasi dalam hal ini berkaitan dengan sektor publik pada daerah bersangkutan dan pada periode waktu tertentu (Bastian, 2006).

Pada Tabel 1.3 menunjukkan besarnya belanja modal pada periode 2005 – 2008. Daerah yang memiliki jumlah belanja modal paling tinggi adalah Kabupaten Cilacap, dimana dilihat dari kondisi perekonomian, Kabupaten Cilacap termasuk pada 6 (enam) besar Kabupaten / Kota yang memiliki peranan penting / dominan terhadap pembentukan PDRB Jawa Tengah (BPS, 2009).

Tabel 1.3
Realisasi Belanja Modal
Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2008
(jutaan rupiah)

No.	Kabupaten / Kota	Tahun							
		2005		2006		2007		2008	
		Belanja Modal	Laju (%)	Belanja Modal	Laju (%)	Belanja Modal	Laju (%)	Belanja Modal	Laju (%)
1	Cilacap	87.651,91	73,05	226.107,78	157,96	506.785,71	124,13	501.349,87	-1,07
2	Banyumas	53.521,14	21,35	122.919,46	129,67	141.468,69	15,09	173.228,31	22,45
3	Purbalingga	40.088,61	-8,15	89.777,53	123,95	120.332,56	34,03	180.386,71	49,91
4	Banjarneegara	44.722,39	60,42	109.443,48	144,72	128.769,80	17,66	138.287,45	7,39
5	Kebumen	79.014,36	21,44	100.453,80	27,13	239.840,87	138,76	160.041,45	-33,27
6	Purworejo	21.207,53	-47,61	52.645,08	148,24	118.004,76	124,15	209.552,82	77,58
7	Wonosobo	57.441,26	29,48	112.715,25	96,23	137.532,56	22,02	160.949,52	17,03
8	Kab. Magelang	44.724,31	5,92	122.955,49	174,92	128.210,80	4,27	121.809,61	-4,99
9	Boyolali	44.491,02	-6,89	74.010,25	66,35	158.110,27	113,63	124.533,01	-21,24
10	Klaten	36.123,77	33,66	83.645,56	131,55	138.749,67	65,88	129.773,87	-6,47
11	Sukoharjo	36.567,45	31,90	75.651,99	106,88	123.087,29	62,70	158.219,72	28,54
12	Wonogiri	69.302,79	0,80	154.512,19	122,95	92.138,56	-40,37	144.349,17	56,67
13	Karanganyar	51.754,83	21,14	79.260,50	53,15	107.560,12	35,70	149.886,54	39,35
14	Sragen	40.110,56	-8,16	113.714,73	183,50	174.442,69	53,40	170.554,07	-2,23
15	Grobogan	104.789,32	31,37	80.695,68	-22,99	160.408,65	98,78	183.054,25	14,12
16	Blora	33.604,94	-43,11	58.171,35	73,10	112.130,94	92,76	141.454,93	26,15
17	Rembang	16.682,74	-22,41	56.917,81	241,18	164.919,16	189,75	123.254,54	-25,26
18	Pati	53.957,11	-1,15	159.667,29	195,92	159.112,78	-0,35	162.413,28	2,07
19	Kudus	112.876,13	200,31	66.246,39	-41,31	121.783,97	83,83	165.755,91	36,11
20	Jepara	55.519,18	9,91	121.083,13	118,09	172.895,53	42,79	156.369,72	-9,56
21	Demak	22.675,94	-9,41	36.437,17	60,69	162.757,87	346,68	112.693,55	-30,76
22	Kab. Semarang	37.071,54	3,93	102.258,05	175,84	139.346,03	36,27	164.116,61	17,78
23	Temanggung	31.614,95	-46,29	77.192,84	144,17	101.958,27	32,08	119.137,75	16,85
24	Kendal	8.425,64	-94,95	175.510,95	1.983,06	118.589,66	-32,43	116.591,45	-1,68
25	Batang	29.826,30	-16,30	54.389,64	82,35	108.532,90	99,55	119.144,41	9,78
26	Pekalongan	37.321,11	-3,02	50.847,71	36,24	194.404,39	282,33	96.600,86	-50,31
27	Pemalang	24.551,63	-66,52	115.895,37	372,05	148.413,02	28,06	135.099,80	-8,97
28	Kab. Tegal	64.744,38	-16,43	149.519,14	130,94	159.746,28	6,84	191.884,27	20,12
29	Brebes	79.018,04	-4,33	118.285,28	49,69	195.849,75	65,57	195.181,84	-0,34
30	Kota Magelang	26.074,91	-22,51	49.953,72	91,58	74.579,04	49,30	171.668,13	130,18
31	Kota Surakarta	7.194,98	-47,07	64.730,60	799,66	127.254,38	96,59	163.614,68	28,57
32	Kota Salatiga	33.794,39	-24,48	54.435,15	61,08	55.443,57	1,85	126.481,27	128,13
33	Kota Semarang	83.788,48	-4,37	90.437,28	7,94	159.469,84	76,33	155.065,66	-2,76
34	Kota Pekalongan	27.414,43	-36,71	50.847,71	85,48	194.404,39	282,33	104.148,89	-46,43
35	Kota Tegal	64.841,79	-28,96	72.387,54	11,64	85.665,20	18,34	94.109,84	9,86

Sumber : Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota, Biro Keuangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah, Berbagai tahun

Dalam Tabel 1.3 terlihat belanja modal tiap – tiap wilayah memiliki tren yang berbeda – beda. Hal ini terkait dengan kebutuhan di masing – masing daerah yang juga berbeda – beda. Daerah yang memiliki belanja daerah yang tergolong besar adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Semarang. Secara teori kenaikan pengeluaran pemerintah untuk belanja modal ini akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi, mengingat belanja modal mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian suatu wilayah, namun pada Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2005 – 2008 tidak semua penambahan atau pengurangan belanja modal Kabupaten / Kota seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing – masing. Hanya terdapat 1 (satu) wilayah saja yang kenaikan jumlah belanja modalnya selaras dengan kenaikan laju pertumbuhan ekonominya yaitu Kabupaten Wonosobo. Selain di daerah tersebut hubungan antara belanja modal dengan laju pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif dan tidak ada tren yang tetap untuk kenaikan jumlah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Operasi
Pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005 – 2008
(jutaan rupiah)

No.	Kabupaten / Kota	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Cilacap	431.152,63	537.476,55	558.471,08	826.946,65
2	Banyumas	440.135,92	593.615,27	725.673,66	817.725,34
3	Purbalingga	276.466,22	360.463,09	400.754,03	482.676,88
4	Banjarnegara	293.650,38	397.177,74	481.591,25	577.656,51
5	Kebumen	337.382,86	516.699,60	592.869,10	699.126,44
6	Purworejo	282.931,72	409.490,06	456.561,67	584.770,64
7	Wonosobo	221.516,84	318.850,76	371.487,47	466.686,80
8	Kab. Magelang	353.621,06	497.269,68	605.425,76	731.010,67
9	Boyolali	323.562,12	397.103,68	576.841,66	663.115,70
10	Klaten	431.860,88	627.386,47	727.169,22	854.309,52
11	Sukoharjo	276.584,25	410.669,25	510.220,82	523.957,85
12	Wonogiri	100.318,23	445.814,20	495.638,88	631.246,67
13	Karanganyar	300.942,39	411.778,59	473.543,04	579.033,73
14	Sragen	346.275,23	478.635,92	525.291,70	633.868,89
15	Grobogan	333.543,05	501.107,52	578.042,63	686.832,06
16	Blora	276.867,98	389.515,00	425.300,06	577.494,56
17	Rembang	226.207,78	350.006,34	313.644,96	465.435,65
18	Pati	371.386,83	587.723,44	587.723,44	728.819,76
19	Kudus	297.236,28	378.559,25	481.663,01	557.876,30
20	Jepara	290.693,74	416.993,15	471.522,10	557.982,98
21	Demak	285.663,11	383.966,78	434.962,52	577.802,04
22	Kab. Semarang	310.096,56	397.532,18	481.079,30	594.207,68
23	Temanggung	219.842,72	291.660,27	101.958,27	492.093,13
24	Kendal	263.900,17	377.452,11	475.097,75	639.736,86
25	Batang	220.366,84	349.155,21	370.281,39	417.047,84
26	Kab. Pekalongan	259.551,34	388.135,61	353.699,71	541.586,16
27	Pemalang	328.234,94	441.992,68	500.636,01	627.466,73
28	Kab. Tegal	330.173,62	444.812,82	528.028,04	665.301,97
29	Brebes	371.480,24	476.227,02	660.642,69	772.991,23
30	Kota Magelang	142.760,02	192.277,29	242.403,40	209.903,25
31	Kota Surakarta	293.540,75	405.434,36	460.748,75	596.466,18
32	Kota Salatiga	125.953,01	153.857,78	198.241,06	241.853,73
33	Kota Semarang	531.616,08	836.569,74	964.379,35	1.170.235,95
34	Kota Pekalongan	129.392,90	185.332,07	236.636,45	280.950,43
35	Kota Tegal	18.004,45	219.370,02	247.791,54	299.090,20

Sumber : Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota, Biro Keuangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa tengah, Berbagai tahun

Berbeda halnya pada belanja modal yang cenderung fluktuatif, pada Tabel 1.4 terlihat tren dari belanja operasi selama periode 2005 – 2008 yang cenderung

meningkat. Hanya terdapat empat wilayah saja yang trennya fluktuatif selama periode tersebut, yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Magelang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan – kebutuhan konsumtif pemerintah daerah yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan besarnya belanja modal, jumlah belanja operasi ini jauh lebih besar daripada jumlah belanja modal, menurut Siti Aisyah Tri Rahayu (2004) semakin besarnya penggunaan anggaran untuk keperluan konsumtif pemerintahan, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

Berdasarkan paparan diatas penulis merasa perlu untuk menganalisis sejauh mana pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2005 – 2008.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja dan tingkat keterbukaan ekonomi. Sedangkan untuk investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Tri Rahayu (2004) yang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara investasi pemerintah daerah yang dilihat dari rasio antar belanja modal dengan PDRB daerah bersangkutan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel konsumsi pemerintah yang dilihat dari rasio antar belanja operasi dengan

PDRB daerah bersangkutan dan variabel tenaga kerja menunjukkan hubungan yang positif akan tetapi tidak signifikan dampaknya terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Tidak signifikannya konsumsi pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi kemungkinan bisa disebabkan karena dalam pengeluaran pemerintah untuk konsumsi terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran sejalan dengan semakin besarnya pos pengeluaran pemerintah.

Sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou (1996) yang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara rasio pengeluaran rutin terhadap PDB terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hubungan antara rasio pengeluaran pembangunan terhadap PDB dengan laju pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Penelitian yang dilakukan Mesghena Yasin (2002) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada kasus di Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu 2005 – 2008 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah rata – rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah jika di bandingkan dengan Provinsi lain di pulau Jawa selama kurun waktu 2005 – 2008. Perekonomian Provinsi Jawa Tengah sendiri ditunjang oleh keberadaan 35 Kabupaten / Kota yang berada di wilayahnya. Untuk laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2005 – 2008 terlihat masih berfluktuatif. Fluktuasi tersebut secara teori dapat dipengaruhi

oleh peran pemerintah dalam perekonomian yang ditunjukkan dari seberapa besar pengeluaran pemerintah yaitu dalam hal ini adalah jumlah belanja modal dan belanja operasi pada masing – masing Kabupaten / Kota.

Berdasarkan data di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2005 – 2008, peningkatan belanja modal yang dilakukan pemerintah tidak selalu disertai dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan hanya ada 1 (satu) daerah saja yang peningkatan belanja modalnya seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya pada belanja modal yang cenderung fluktuatif, pada belanja operasi memiliki tren yang cenderung meningkat tiap tahunnya, hanya saja jumlah belanja operasi yang terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah belanja modalnya dapat berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai keadaan perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 – 2008 khususnya pada masalah laju pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan belanja operasi, serta adanya penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda – beda (*research gap*) mengenai hubungan belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai sejauh apa pengaruh belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2005 – 2008 dengan judul penelitian “PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASI TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH” dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2005 – 2008. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan antara belanja modal dengan laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2005 – 2008.
2. Untuk menganalisis hubungan antara belanja operasi dengan laju pertumbuhan ekonomi pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2005 – 2008.
3. Untuk menganalisis perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah pada 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2005 – 2008.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

1. Referensi bagi studi – studi selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

2. Perbendaharaan ilmiah bagi masyarakat umum ataupun mahasiswa pada khususnya, khususnya bagi studi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika BAB yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Hasil dan Pembahasan, dan BAB V Simpulan dan Saran.

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, menguraikan variabel yang digunakan dalam penelitian beserta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menguraikan hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung serta membantu dalam memecahkan masalah penelitian.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1985), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ketahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam PDRB, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1997). Pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan karena akan membuat masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang besar dan juga penyediaan barang dan jasa sosial, sehingga standar hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu:

1. Proses

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi pada suatu waktu tertentu. Melainkan gambaran suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

2. Output per kapita

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi mencakup pertumbuhan GDP total dan pertumbuhan penduduk.

3. Jangka waktu

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dalam waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita.

Kuznet (1971) dalam Sadono Sukirno (2004), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya,

pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan.

Menurut Jhingan (1993), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, usaha, teknologi, dan sebagainya. Faktor – faktor tersebut termasuk dalam faktor ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Faktor – faktor tersebut termasuk dalam faktor non ekonomi. Adapun faktor ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Sumber daya alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam atau tanah. Dalam pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidak dapat berkembang cepat.

2. Akumulasi modal

Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal berarti masyarakat tidak melakukan seluruh kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya saat konsumsi yang mendesak, melainkan juga mengarahkan sebagian dari padanya untuk pembuatan barang modal, alat – alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas

pengangkutan, pabrik dan peralatannya. Dalam hal ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

3. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor – faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

4. Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

5. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dalam pembagian kerja menimbulkan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

Faktor ekonomi bersama – sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan psikologi adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi (Jhingan, 1993).

Tingkat pertumbuhan dari perekonomian adalah tingkat dimana pendapatan nasional atau produk nasional meningkat (Dornbusch, 2004). Pendapatan nasional atau produk nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang - barang dan jasa – jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2004).

Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional atau pendapatan nasional diatas dibedakan kepada dua pengertian, yaitu: produk nasional bruto (PNB) dan produk domestik bruto (PDB). Produk nasional yang diwujudkan oleh warga negara suatu negara dinamakan Produk Nasional Bruto. Sedangkan Produk domestik bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh penduduk dalam suatu negara. Kedua konsep tersebut pada hakekatnya adalah merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.

Untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dapat dilakukan dengan 3 cara (Sukirno, 2004):

1. Cara pengeluaran: pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran ke atas barang dan jasa yang diproduksi.
2. Cara produksi: pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian.
3. Cara pendapatan: pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

2.1.1.2 Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, fungsi produksi sederhana dari teori ini adalah (Mankiw, 2003) :

$$Y = A K \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana Y adalah output, A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, sedangkan K adalah persediaan modal. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Modifikasi fungsi produksi Cobb-Douglas dalam Barro dan Sala-i-Martin (1995) dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = A L_i^{1-\alpha} K_i^\alpha G^{1-\alpha}, 0 < \alpha < 1 \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan pada *constant return to scale* pada input L_i dan K_i . Asumsinya adalah angkatan kerja agregat (L) adalah konstan. Pengeluaran pemerintah (G) berada pada *deminishing return* untuk modal agregat (K). Oleh karena itu, perekonomian berada pada kondisi pertumbuhan ekonomi endogen.

Barro dan Sala-i-Martin (1995) menyatakan bahwa kegiatan pemerintah mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pemerintah adalah pengadaan jasa – jasa infrastruktur, perlindungan hak kepemilikan dan pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi. Perubahan – perubahan pada aktivitas pemerintah akan menyebabkan pergeseran pada fungsi produksi.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

2.1.2.1 Konsep Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemereintah yang digunakan terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan fasilitas keamanan seperti polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sukirno, 2004). Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji, membeli alat – alat kantor dan membeli bensin untuk kendaraan operasional pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, namun seperti pemberian subsidi dan pemberian beasiswa tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas dasar produk nasional karena pengeluaran itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam realisasi anggaran yaitu belanja operasi, sedangkan pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam realisasi anggaran yaitu belanja modal. Untuk jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada beberapa faktor, yaitu (Sukirno, 2004):

1. Jumlah pajak yang diramalkan

Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus lebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Pemerintah penting sekali perannya dalam mengatur perekonomian. Kegiatannya dapat mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pengeluaran pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sering membelanjakan uang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan menarik minat swasta untuk berinvestasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan – jalan, pelabuhan, membangun pendidikan dan kesehatan. Usaha ini memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayai semua itu, maka untuk membiayainya pemerintah terpaksa berhutang atau mencetak uang baru.

3. Pertimbangan politik dan kestabilan negara

Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah.

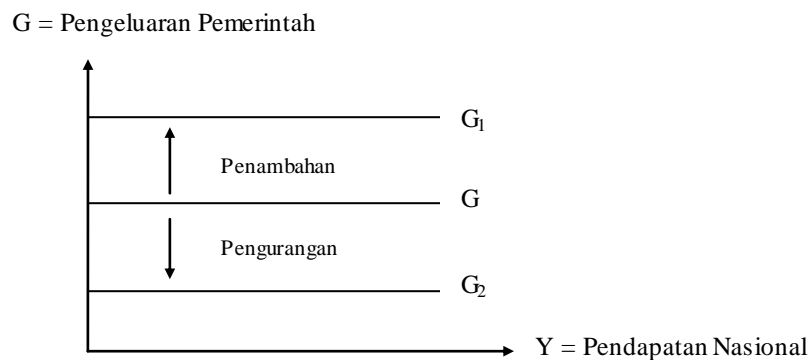
Kekacauan politik akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar terutama bila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan pengeluaran yang besar dalam pengeluaran militer dan akan memaksa pemerintah membelanjakan pengeluarannya lebih besar dari penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan penting dalam menentukan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan pada pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran misalnya pendapatan pajak berkurang. Tetapi untuk mengatasi kondisi semacam itu maka pengeluaran pemerintah perlu lebih banyak dialokasikan kepada program – program pembangunan. Sebaliknya, pada tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati – hati dalam pembelanjanya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku. Berikut gambar yang menjelaskan antara hubungan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, pengeluaran pemerintah adalah seperti yang digambarkan dalam Gambar 2.1 yaitu sejajar dengan sumbu Y dan berarti bahwa besarnya pengeluaran pemerintah tidak tergantung pada pendapatan nasional. Dan perubahan pembelanjaan pemerintah digambarkan dalam bentuk perpindahan fungsi pemerintah ke atas atau ke bawah. Sebagai contoh, dalam suatu periode tertentu pengeluaran pemerintah adalah

sebanyak G rupiah, fungsi pengeluaran pemerintah adalah seperti ditunjukkan oleh fungsi G . Pada periode berikut misalkan berlaku pengangguran yang sangat buruk dan untuk mengatasinya pemerintah melakukan pembelanjaan yang lebih banyak, yaitu sebesar G_1 , langkah ini akan memindahkan fungsi G ke atas. Sebaliknya untuk mengatasi inflasi, pemerintah berusaha menurunkan pengeluarannya dan perubahan ini digambarkan oleh perpindahan fungsi pembelanjaan pemerintah dari G menjadi G_2 .

Gambar 2.1
Pengeluaran Pemerintah



Sumber : Sukirno, 2004

2.1.2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ merupakan sumber legitimasi kaum keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan / penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan / menurunkan pendapatan nasional.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional, sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel – variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997)

2. Pembangunan dan perkembangan pengeluaran pemerintah

Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu (Mangkoesoebroto, 2001):

a. Tahap awal

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

b. Tahap menengah

Investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan pemerintah harus menyediakan barang

dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Investasi swasta dalam prosentase terhadap GNP semakin besar dan prosentase pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

c. Tahap lanjut

Pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Teori mengenai perkembangan prosentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 2001). Hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}} \dots\dots\dots (2.3)$$

Keterangan :

GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita

YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks waktu (tahun)

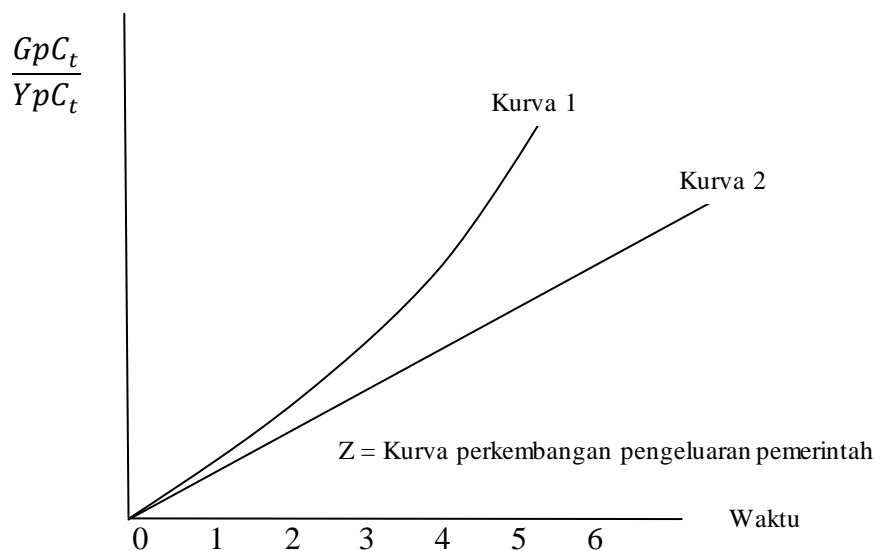
Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu : tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan

pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997).

Hukum Wagner ditunjukkan dalam Gambar berikut ini, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, bukan oleh kurva 2.

Gambar 2.2

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber : Mangkoesoebroto, 2001

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Peacock dan Wiseman menyatakan sebagai berikut : perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak

tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

2.1.2.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (1994), pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa – masa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan atas penilaian tersebut, maka dapat dibedakan bermacam – macam pengeluaran pemerintah seperti:

1. Pengeluaran yang *self-liquidating* sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa – jasa / barang – barang yang bersangkutan. Misalnya, pengeluaran untuk jasa – jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek – proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan – keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan

penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

3. Pengeluaran yang tidak termasuk *self-liquidating* dan tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen, dan sebagainya.
4. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya untuk anak – anak yatim piatu.

Pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi sebagai berikut (Suparmoko, 1994):

1. Pembedaan antara pengeluaran atau belanja rutin dan pengeluaran atau belanja pembangunan,.
 - a) Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari – sehari. Belanja rutin meliputi:

Belanja Pegawai, yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dan segala macam tunjangan.

Belanja Barang, yaitu untuk pembelian barang – barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari – hari.

Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terjaga dengan baik.

Belanja Perjalanan, yaitu biaya untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

b) Belanja Pembangunan, adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik.

2. Perbedaan antara *Current Account* atau *Current Expenditure* dengan *Capital Account* atau *Capital Expenditure*

Current Expenditure atau *Current Budget* (anggaran rutin), yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari – hari termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan.

Capital Expenditure atau *Capital Budget* (belanja pembangunan), yaitu rencana untuk pembelian modal tetap.

3. Perbedaan *Obligatory Expenditure* dengan *Optional Expenditure*, antara *Real Expenditure* dengan *Transfer Expenditure* dan antara *Liquidated Expenditure* dengan *Cash Expenditure*.

Obligatory Expenditure atau pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang bersifat wajib harus dilakukan agar efektivitas pelaksanaan pemerintah dapat terselenggara dengan baik.

Optional Expenditure atau pengeluaran opsional adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba – tiba dibutuhkan.

Real Expenditure atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa.

Transfer Expenditure adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa, jadi tidak ada *direct quid pro quo*.

Liquidated Expenditure adalah pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui oleh DPR atau DPRD. Semula dalam RAPBN /

RAPBD setelah mendapat persetujuan dan pengesahan menjadi APBN / APBD.

Cash Expenditure adalah pengeluaran yang telah sungguh – sungguh dilaksanakan berupa pembayaran – pembayaran nyata.

2.1.2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand* / AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengualaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *social overhead capital* (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak

berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan.

Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan (Alliasuddin dan Dawood, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik (2007) menunjukkan investasi pemerintah dan konsumsi pemerintah yang ditunjukkan oleh jumlah belanja modal dan belanja operasi memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan. Berbagai macam studi empiris yang mencakup berbagai macam sampel daerah dan negara, periode penelitian, dan metode penelitian. Penelitian terdahulu yakni telah dilakukan oleh Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou pada tahun 1996, Mesghena Yasin pada tahun 2002, Siti Aisyah Tri Rahayu pada tahun 2004, dan Jamzani Sodik pada tahun 2007.

Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou dalam penelitiannya yang berjudul *The Composition of Public Expenditure and*

Economic Growth mengemukakan bahwa di 43 negara berkembang selama kurun waktu 1970 – 1990 menunjukkan peningkatan pengeluaran rutin dan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran pembangunan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mesghena Yasin dalam penelitiannya yang berjudul *Public Spending and Economic Growth : Empirical Investigation of Sub Saharan* mengambil sampel di 26 daerah di Sub-Saharan Afrika selama periode 1987 – 1997. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah, bantuan pembangunan, liberalisasi perdagangan, investasi swasta, dan tingkat pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik pengolahan data panel. Hasilnya pengeluaran pemerintah, bantuan pembangunan, liberalisasi perdagangan, investasi swasta, dan tingkat pertumbuhan penduduk memiliki tanda yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Siti Aisyah Tri Rahayu dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987 – 2000)* mengambil sampel 7 Kabupaten / Kota di Eks-Karesidenan Surakarta selama periode 1987 – 2000. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh investasi pemerintah daerah, laju pertumbuhan angkatan kerja, pengeluaran (konsumsi) pemerintah daerah, dan penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan teknik data panel. Secara garis besar hasil estimasi persamaan menunjukkan bahwa selama periode pengamatan peranan sektor

publik lokal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Jamzani Sodik dalam penelitiannya yang berjudul Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia, dengan mengambil sampel di 26 provinsi di Indonesia selama periode 1993 – 2003. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh investasi swasta, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah / provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Hasilnya untuk semua variabel memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional kecuali untuk variabel investasi swasta yang tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti / Judul	Tujuan	Metode Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Empiris
Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou (1996)	Mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang periode 1970 - 1990.	Ekonometrika metode FEM dengan panel data di 43 negara berkembang meliputi Argentina, Bolivia, Brazil, Burkina, Faso, Cameroon, Chile, Colombia, Costa Rica, Egipt, Arab Republic of, El Savador, Eithopia, Guatemala, India, Indonesia, Kenya, Korea, Republic of Liberia, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Thailand, Togo, Turkey, Venezuela, Zaire, Zambia, dan Zimbabwe.	Laju pertumbuhan variabel riil sebagai variabel dependen, dan rasio total pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah terhadap PDB, rasio pengeluaran pemerintah untuk masing-masing sektor terhadap GDP (sektor pertahanan kesehatan) sebagai variabel independen.	Terdapat peningkatan pengeluaran rutin dan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pengeluaran pembangunan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“ <i>The Composition of Public Expenditure and Economic Growth</i> ”				

Peneliti / Judul	Tujuan	Metode Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Empiris
Mesghena Yasin (2002) “ <i>Public Spending and Economic Growth : Empirical Investigation of Sub Saharan</i> ”	Membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Sub-Saharan Afrika periode 1987 - 1997.	Ekonometrika metode FEM dengan panel data meliputi negara - negara sebagai berikut <i>Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Comoros, Cote d'Ivoire, Republic of Congo, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea - Bissau, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Niger, Senegal, Swaziland, Togo, Uganda, dan Zimbabwe.</i>	Laju pertumbuhan ekonomi riil sebagai variabel dependen, dan rasio investasi swasta terhadap GDP, laju pertumbuhan penduduk, rasio pengeluaran pemerintah terhadap GDP, rasio bantuan luar negeri terhadap GDP, dan rasio netto ekspor terhadap GDP sebagai variabel independen.	Hubungan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan terbukti bahwa pengeluaran pemerintah pada penelitian ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Peneliti / Judul	Tujuan	Metode Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Empiris
Siti Aisyah Tri Rahayu (2004) “ Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987 – 2000) ”	Membuktikan pengaruh pengeluaran pemerintah yang merupakan pengeluaran sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Surakarta periode 1987 - 2000.	Ekonometrika Metode FEM dengan panel data yang meliputi kabupaten - kabupaten di Jawa Tengah yang tergabung dalam SUBOSUKOWONOKRA TEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten).	Laju pertumbuhan ekonomi regional (dalam prosentase) sebagai variabel dependen, dan rasio investasi pemerintah daerah dengan PDRB (dalam rasio), laju angkatan kerja (dalam prosentase), rasio pengeluaran / konsumsi pemerintah daerah (dalam rasio), dan rasio penerimaan dari pajak dan bukan pajak dengan PDRB (dalam rasio) sebagai variabel independen.	Secara garis besar hasil estimasi persamaan menunjukkan bahwa ternyata selama periode pengamatan peranan sektor publik lokal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah pada sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi.

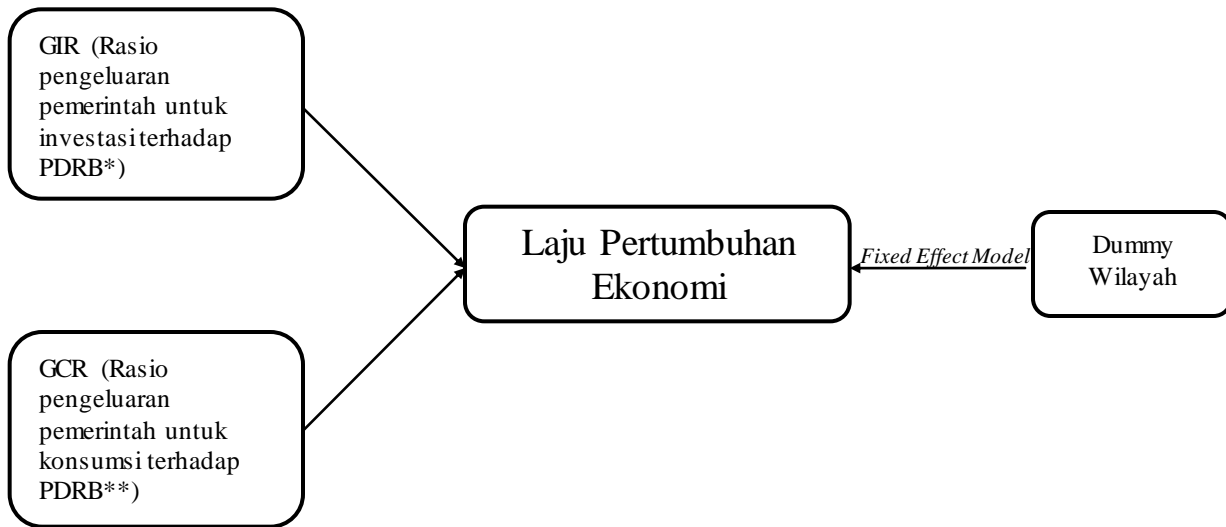
Peneliti / Judul	Tujuan	Metode Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Empiris
Jamzani Sodik (2007) “Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia”	Mengidentifikasi pengaruh investasi swasta, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan tingkat keterbukaan ekonomi provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan data panel 26 provinsi di Indonesia.	Ekonometrika Metode FEM dengan menggunakan data <i>time series</i> dari tahun 1993 – 2003 dan data <i>cross- section</i> dari 26 provinsi di Indonesia.	Laju pertumbuhan ekonomi regional sebagai variabel dependen, dan investasi swasta, investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah / provinsi sebagai variabel independen.	Hasilnya pertumbuhan ekonomi regional untuk periode 1993 – 2003 dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja, dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah / provinsi, sedangkan untuk investasi swasta tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber : Berbagai Jurnal Ilmiah

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2005 – 2008 jika dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya masih tergolong tertinggal jika di bandingkan dengan Provinsi lain di pulau jawa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah faktor investasi swasta, namun investasi swasta selama kurun waktu 2005 – 2008 menunjukkan penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 76,78 persen sehingga hal ini menunjukkan masih diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian, seberapa besar peran pemerintah ini ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pada pos pengeluaran pemerintah, dimana pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi yaitu dilihat dari belanja modal, dan pengeluaran pemerintah yang bersifat konsumsi yang dilihat dari belanja operasi (Suparmoko, 1994). Oleh karena itu diperlukan analisis mengenai pengaruh peran pemerintah melalui alokasi belanja modal dan belanja operasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi dimana hasilnya dapat sebagai saran bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat melalui kedua instrumen tersebut agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pengambilan variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen (laju pertumbuhan ekonomi) didasarkan pada teori – teori dan penelitian – penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi terhadap PDRB (Rahayu, 2004) dan rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi terhadap PDRB (Devarajan, 1996).

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan : → variabel independen mempengaruhi variabel dependen

Sumber : * Siti Aisyah Tri Rahayu (2004)

** Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou (1996)

2.4 Hipotesis

Hasil penelitian Siti Aisyah Tri Rahayu (2004) menunjukkan rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi terhadap PDRB memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Untuk hubungan antara rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi terhadap PDRB dengan laju pertumbuhan ekonomi menurut Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, dan Heng-fu Zou (1996) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
2. Rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi terhadap PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu : laju pertumbuhan ekonomi (GR) sebagai variabel dependen, dan rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi (GIR) dan rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi (GCR) sebagai variabel independen. Serta dalam penelitian ini perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah satu dengan daerah lainnya di gambarkan oleh persamaan dengan menggunakan variabel *dummy*.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi didekati dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 dalam jutaan rupiah.

Laju pertumbuhan PDRB merupakan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun (yoy) yang dihitung dengan formula:

$$GR = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana:

GR : Laju pertumbuhan ekonomi (persen)

$PDRB_t$: PDRB tahun t

$PDRB_{t-1}$: PDRB tahun t-1

b. Rasio Pengeluaran Pemerintah untuk Investasi (GIR)

Pengeluaran pemerintah didekati dengan jumlah belanja modal yang tercantum pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian dirasioikan dengan PDRB di tahun tersebut. APBD yang digunakan pada penelitian ini merupakan realisasi anggaran tiap – tiap daerah penelitian dalam jutaan rupiah.

Rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi dihitung dengan formula:

$$GIR = \frac{GI_n}{PDRB_n} \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

GIR : Rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi (GI/Y)

GI_n : Pengeluaran pemerintah untuk investasi pada tahun n

$PDRB_n$: PDRB tahun n

c. Rasio Pengeluaran Pemerintah untuk Konsumsi (GCR)

Pengeluaran pemerintah didekati dengan jumlah belanja operasi yang tercantum pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian dirasioikan dengan PDRB di tahun tersebut. APBD yang digunakan pada penelitian ini merupakan realisasi anggaran tiap – tiap daerah penelitian dalam jutaan rupiah.

Rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dihitung dengan formula:

$$GCR = \frac{GC_n}{PDRB_n} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

GCR : Rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi (GC/Y)

GC_n : Pengeluaran pemerintah untuk konsumsi pada tahun n

$PDRB_n$: PDRB tahun n

d. *Dummy* Wilayah (D)

Model regresi variabel tak bebas Y dan variabel penjelas X bersifat bilangan kuantitatif. Namun hal ini tak selalu berlaku, dan ada kalanya variabel – variabel penjelas bisa bersifat kualitatif. Variabel kualitatif ini sering dikenal dengan variabel buatan atau variabel *dummy* atau variabel boneka (Gujarati, 2003). Variabel *dummy* ini ditunjukkan dengan angka 0 dan 1. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini untuk melihat perbedaan pertumbuhan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu.

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan data *time series* dan *cross-section*. Data *time series* dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2008 dan data *cross-section* yaitu 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik data panel dengan menggabungkan jenis data *time series* dan *cross-section*, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *time series* dan *cross-section*. Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross-section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data

panel, unit *cross-section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu. (Gujarati, 2003).

Menurut Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan data panel dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *time series* maupun *cross-section*, yaitu pertama dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya dengan data *time series* dan *cross-section*. Ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*. Sedangkan menurut Gujarati (2003) keunggulan dari penggunaan data panel adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan data panel akan mengedepankan adanya heterogenitas karena menggunakan variabel-variabel individual yang spesifik.
- b. Penggabungan data *time series* dan *cross-section* akan menghasilkan data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi keterkaitan antar variabel dan mempunyai derajat kebebasan yang lebih besar serta lebih efisien.
- c. Dengan mempelajari observasi *cross section* secara berulang-ulang, data panel lebih cocok mempelajari perubahan yang dinamik.
- d. Dapat menjelaskan dan mendeteksi pengaruh-pengaruh yang tidak bisa dijelaskan menggunakan hanya oleh data *time series* dan *cross-section* saja.

- e. Panel data dapat digunakan untuk mempelajari perilaku model yang lebih kompleks.
- f. Data panel dapat meminimalisasi bias.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi – Provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha, publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia.
2. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia.
3. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota, publikasi Sekretariat Daerah Jawa Tengah.
4. Jawa Tengah Dalam Angka, Publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
5. PDRB Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur – literatur yang berkaitan dengan objek studi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data – data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk

mendeskripsikan fenomena – fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan sebagainya).

Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari spesifikasi model, analisis dengan data panel, uji asumsi klasik, dan uji statistik.

3.4.1 Spesifikasi Model

Untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah untuk investasi (GIR), pengeluaran pemerintah untuk konsumsi (GCR) terhadap laju pertumbuhan ekonomi (GR), maka digunakan analisis regresi dengan menggunakan program Eviews 6.0. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data panel. Adapun persamaan yang digunakan dibentuk berdasarkan teori sebagai berikut (Mankiw, 2003):

$$Y = A K \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana:

Y = Tingkat output

K = Persediaan modal fisik

A = Konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit model

Berdasarkan persamaan (3.4) dapat diketahui bahwa modal mempengaruhi tingkat output. Asumsi yang diberikan pada persamaan (3.4) adalah *constant return to scale*, maka K dapat digantikan oleh G, dimana G adalah pengeluaran pemerintah, sehingga persamaan (3.4) dapat dituliskan kembali sebagai berikut:

$$Y = f(G) \quad \dots\dots\dots (3.5)$$

Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran pemerintah untuk investasi (GI) dan konsumsi (GC). Kemudian persamaan (3.5) dapat diturunkan terhadap Y, sehingga akan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{dY}{Y} = \left(\frac{\delta Y}{\delta GI} \right) \frac{dGI}{Y} + \left(\frac{\delta Y}{\delta GC} \right) \frac{dGC}{Y} \quad \dots\dots\dots (3.6)$$

Dimana:

$\frac{\delta Y}{\delta GI}$ = Marginal produk dari pengeluaran pemerintah untuk investasi

$\frac{\delta Y}{\delta GC}$ = Marginal produk dari pengeluaran pemerintah untuk konsumsi

Arah hubungan semua penurunan parsial terhadap output diasumsikan positif, dan untuk pengujian empiris, notasi $\frac{\delta Y}{\delta GI} = \alpha_1$ dan $\frac{\delta Y}{\delta GC} = \alpha_2$. Variabel – variabel dalam persamaan ini dinotasikan $\frac{dY}{Y} = GR$, $\frac{dGI}{Y} = GIR$, dan $\frac{dGC}{Y} = GCR$. Sehingga persamaan baru yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut (Rahayu, 2004):

$$GR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 GIR_{it} + \alpha_2 GCR_{it} + e_{it} \quad \dots\dots\dots (3.7)$$

Dimana:

GR = Laju pertumbuhan ekonomi (*Growth Rate*)

GIR = Rasio pengeluaran pemerintah untuk investasi terhadap PDRB (*Government Investment Ratio*)

GCR = Rasio pengeluaran pemerintah untuk konsumsi terhadap PDRB (*Government Consumption Ratio*)

α_0 = Nilai *autonomous* tingkat pertumbuhan ekonomi

α_1, α_2 = Koefisien variabel – variabel independen

e_{it} = Variabel pengganggu

i = 1, 2, ..., 35

t = 2005, 2006, 2007, 2008

Selanjutnya, berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, maka setidaknya ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu Gujarati (2003):

1. Metode OLS atau dikenal juga sebagai metode *common effect* atau koefisien tetap antar waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu. Ini adalah teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel.

2. Metode *fixed effect* atau slope konstan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa e_{it} merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam *constant term* pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *least squares dummy variable* (LSDV). Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.

3. Metode *random effect* menetapkan e_{it} sebagai gangguan spesifik kelompok identik dengan e_{it} , kecuali terhadap masing-masing kelompok. Namun gambaran tunggal yang memasukan regresi identik untuk setiap periode. Model ini lebih dikenal sebagai model *generalized least squares* (GLS).

3.4.2 Pengujian Model

Untuk memilih model yang tepat, dapat dilakukan beberapa pengujian model (Gujarati, 2003), yaitu *pertama* menggunakan Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji F), yaitu untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau model *common effect*. Adapun uji F statistiknya, sebagai berikut;

$$F = \frac{(RRSS - URSS) / (m)}{(1 - RRSS) / (nt - n - k)} \dots\dots\dots (3.8)$$

Dimana:

RRSS : *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode OLS / *common effect*).

URSS : *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

Jika hasil *Restricted F Test* menunjukkan hasil yang lebih besar daripada F tabel berarti menggunakan model *fixed effect* lebih baik daripada menggunakan model *common effect*, begitu juga sebaliknya. Jika hasil menunjukkan model yang lebih baik digunakan adalah model *fixed effect*, maka pengujian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji hausman, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang lebih baik untuk digunakan. Uji Hausman dilakukan dengan melihat signifikansi dari probabilitas dari uji hausman itu sendiri. Jika uji hausman menunjukkan probabilitas yang signifikan maka menggunakan model *fixed effect* lebih baik daripada menggunakan model *random*

effect, begitu juga dengan sebaliknya. Namun jika hasil dari *Restricted F Test* menunjukkan bahwa model yang lebih baik untuk digunakan adalah model *common effect* maka pengujian selanjutnya yang perlu dilakukan adalah uji lagrange multiplier (LM), yang digunakan untuk mengetahui apakah menggunakan model *common effect* lebih baik daripada model *random effect*. Jika hasil dari uji LM menunjukkan H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima maka model yang lebih baik digunakan adalah model *random effect*, begitu juga dengan sebaliknya.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Pengujian model dimaksud untuk memperoleh kepastian tentang konsistensi model estimasi yang dibentuk berdasarkan teori ekonomi yang melandasinya. Pengujian penyimpangan asumsi klasik dimaksud untuk menjamin bahwa model yang diestimasi bebas dari gangguan autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedasitas. Pengujian terhadap gangguan tersebut adalah sebagai berikut :

3.5.1 Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen dalam model regresi.

Penelitian ini akan menggunakan *auxilliary regressions* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Caranya adalah dengan melakukan regresi antara variabel independennya untuk mengetahui t-statistik dari hasil *auxilliary*

regressions. Jika t-statistik signifikan, maka terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi tersebut, begitu juga dengan sebaliknya.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gujarati (2003) asumsi penting model regresi linear klasik (CLRM) adalah bahwa gangguan e_{it} yang tercakup dalam fungsi regresi populasi (PRF) bersifat homoskedastis, artinya semua memiliki varians yang sama, σ^2 . Jika tidak demikian, dimana u_i adalah σ_i^2 yang menunjukkan bervariasi dari observasi ke observasi berarti kita menganggap situasi heteroskedastisitas atau varians tak sama. Banyak cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model, salah satunya adalah dengan menggunakan Uji White (*White Test*).

Pedoman dari penggunaan model White adalah menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Obs*R-squared* Uji White dengan nilai χ^2 tabel. Nilai *Obs*R-squared* yang lebih kecil dibandingkan nilai χ^2 (*chi-square*) tabel, menunjukkan bahwa model estimasi regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

3.5.3 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2002), uji *autokorelasi* bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi, maka ada indikasi masalah *autokorelasi*. *Autokorelasi* muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Masalah ini muncul karena residu (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada jenis data *times series*.

Penelitian ini akan menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi. Langkah – langkah pengujian autokorelasi dengan Durbin – Watson adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan ketentuan:

Ho : Tidak ada autokorelasi (positif / negatif)

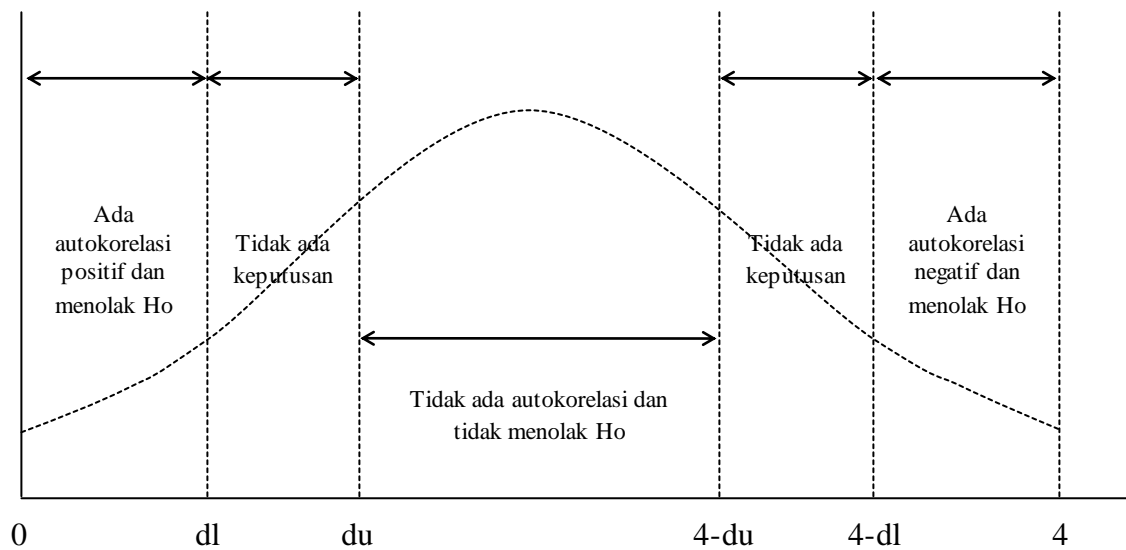
H1 : Ada autokorelasi (positif / negatif).
- b. Mengestimasi model dan melihat nilai Durbin – Watson hitung dari hasil estimasi model.
- c. Menghitung Durbin – Watson kritis yang terdiri dari nilai kritis dari batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) dengan menggunakan jumlah data (n), jumlah variabel independen / bebas (k), serta tingkat signifikansi tertentu (α).
- d. Nilai DW hitung dibandingkan dengan DW kritis dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Pengujian Durbin – Watson

HIPOTESIS NOL	KEPUTUSAN	KRITERIA
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_u < d < 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1
Kriteria Pengujian Durbin – Watson



Sumber : Gujarati, 2003

3.6 Pengujian Statistik Analisis Regresi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji diterima atau ditolaknya (secara statistik) hasil hipotesis nol (H_0) dari sampel. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003).

3.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya (*goodness of fit test*). Nilai R^2 dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum y_1 x_1 + \beta_2 \sum y_2 x_2 + \dots + \beta_n \sum y_n x_n}{\sum y_n^2} \dots\dots\dots (3.9)$$

Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Gujarati, 2003).

3.6.2 Pengujian *Best of Fit* Model

a. Pengujian koefisien regresi serentak (Uji F)

Dalam Gujarati (2003), uji F merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana F_{hitung} dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{\left(\frac{R^2}{k-1} \right)}{\left(\frac{1-R^2}{n-k} \right)} \dots\dots\dots (3.10)$$

Dimana:

R^2 : koefisien determinasi

n : jumlah observasi

k : jumlah variabel penjelas termasuk konstanta

Hipotesis yang diajukan yaitu:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$

H_1 : Tidak semua koefisien slope bersimultan nol

Kriteria dalam uji F yaitu bila nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai F_{tabel} ($F > F_{\alpha, df}$), maka H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Atau apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

F_{tabel} diperoleh dengan derajat kebebasan variasi regresi k (banyaknya variabel), dan derajat kebebasan variasi residual $n-k-1$ (banyaknya observasi-banyaknya variabel-1)

b. Pengujian koefisien regresi secara individual (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : b_i > 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002).

Pengujian Hipotesis :

- Jika nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima
- Jika nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima.